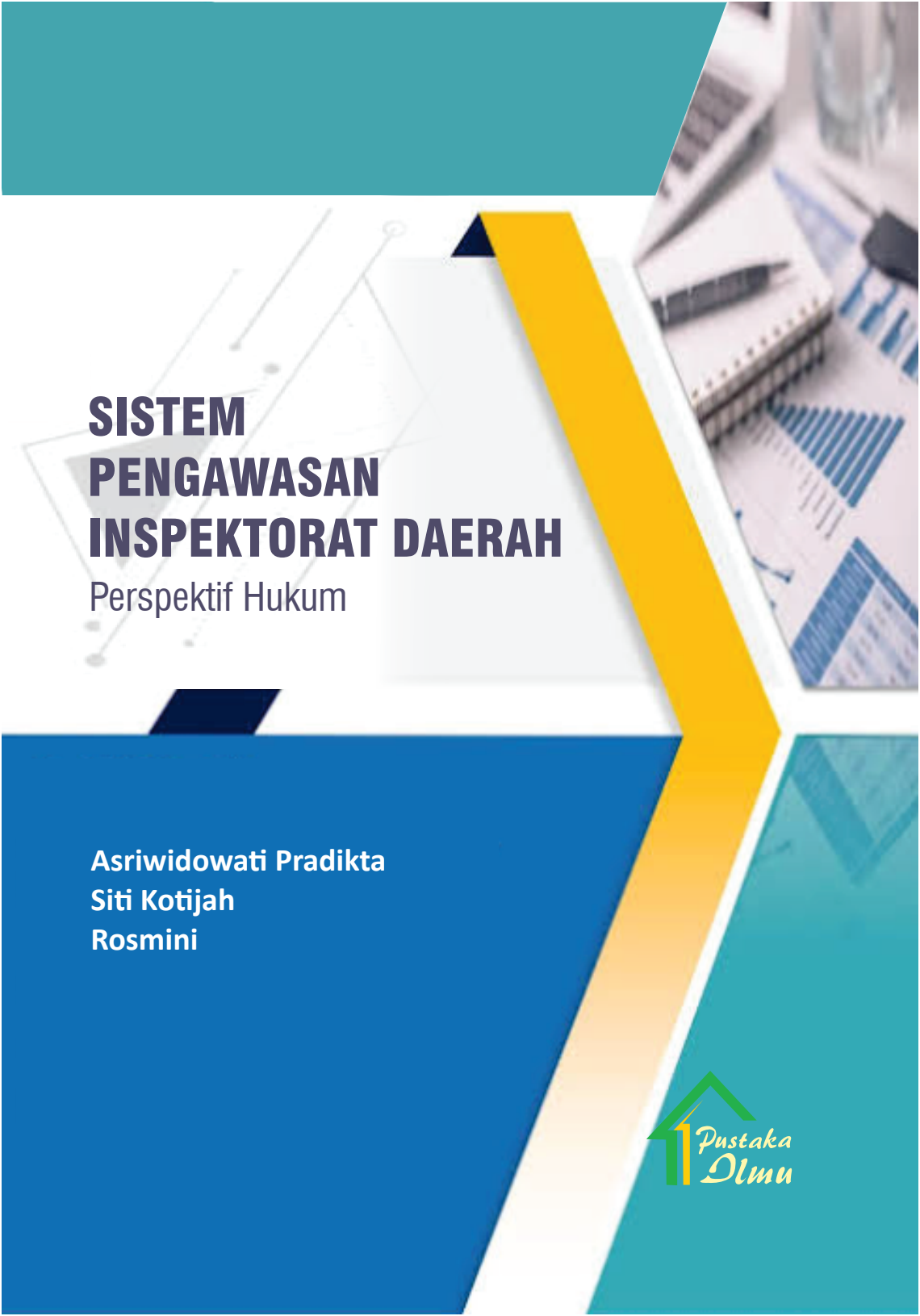


The cover features a teal top section, a white middle section with faint line art, and a blue bottom section. A large yellow chevron points from the top right towards the bottom left. The background includes a blurred image of office supplies like a calculator, pen, and documents.

# **SISTEM PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH**

Perspektif Hukum

**Asriwidowati Pradikta  
Siti Kotijah  
Rosmini**



# **SISTEM PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH**

## PERSPEKTIF HUKUM

Asriwidowati Pradikta  
Siti Kotijah  
Rosmini



## **SISTEM PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH: PERSPEKTIF HUKUM**

Copyright © Pustaka Ilmu, 2025

Hak Cipta Ada Pada Penulis

viii + 214 hlm.; 14,5 x 21 cm

E-ISBN: 978-623-509-309-3

Penulis : Asriwidowati Pradikta  
Siti Kotijah  
Rosmini

Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M. Hum.

## **SISTEM PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH: PERSPEKTIF HUKUM**

Diterbitkan (cetakan 1) Januari 2025 oleh:

Pustaka Ilmu

Griya Larasati No.079 Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta

Telp/Faks: (0274) 4435538

E-mail: redaksipintukata@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Anggota IKAPI

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

## KATA PENGANTAR

Inspektorat Provinsi atau inspektorat kabupaten/kota, juga dikenal sebagai inspektorat daerah, merupakan lembaga yang berada di level pemerintahan daerah tingkat I (provinsi) atau daerah tingkat II (kabupaten/kota). Tugasnya untuk memberi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dari segi kebijakan, anggaran, maupun kinerja pemerintah daerah. Semua itu untuk memastikan, tugas-tugas dan fungsi pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Inspektorat daerah memegang peranan penting dalam proses terwujudnya akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan keuangan daerah untuk meminimalisir terjadinya korupsi dan kecurangan, serta-serta mengawasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan kebijakan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

Tujuan penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah dapat sebagai komitmen mengawal dan memberikan perhatian khusus tugas pengawasan yang dilaksanakan dapat lebih independen. Selain itu, didukung dengan pengembangan prosedur kerja dan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia inspektorat daerah, dan penguatan regulasi dalam spesifikasi pembagian peran/tugas inspektorat daerah yang jelas agar Inspektorat dapat lebih memiliki wibawa dan independen di masa yang akan datang.

Buku “Sistem Pengawasan Inspektorat Daerah Perspektif Hukum” ini memberi wawasan terhadap dunia pengawasan intern di dalam pemerintahan daerah,

khususnya Kalimantan Timur untuk memahami aktivitas kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keuangan negara dari penyalagunaan wewenang serta Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Sistem pengawasan inspektorat daerah penting bagi pemula yang ingin memahami dunia sistem pengawasan inspektorat daerah, mahasiswa, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pegawai pemerintah serta masyarakat secara umum.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini. Terimakasih buat orangtua dinda (Bapak Jae's, dan Ibunda Yasitin alm), suami Evans Sofanus yang selalu memberi motivasi dan dukungan penuh atas hobby menulis saya. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini, terkhusus Mbak Asri atas aspirasi, ide, gagasan yang membuka cakrawala terhadap pengawasan inspektorat daerah.

Karya yang indah, kadang sering lupakan untuk dipublikasikan. Semoga buku ini menjadi penanda peradaban bahwa kita ada, untuk hadir pada zamannya. Tidak ada yang sempurna dalam karya seseorang, semua milik Allah. Dalam diam, doa khusus, rasa syukur atas nikmat atas berkarya. Semoga buku ini memberi berkah, manfaat bagi semua orang. Karya ini aku tabur, semoga tumbuh subur, terus berkarya untuk berbicara pada dunia, pertanda kita ada.

Samarinda, 2 Januari 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                | iii   |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                    | v     |
| <br>BAB I                                                                                                                           | <br>1 |
| KONSEP PENGAWASAN INSPEKTORAT .....                                                                                                 |       |
| A. Ratio Legis Pengawasan Inspektorat .....                                                                                         | 1     |
| B. Tujuan Pengawasan Inspektorat .....                                                                                              | 15    |
| C. Pengawasan Inspektorat dalam Perseptif Teori<br>Hukum.....                                                                       | 17    |
| <br>BAB II                                                                                                                          |       |
| PENGATURAN PENGAWASAN INSPEKTORAT<br>DAERAH .....                                                                                   | 38    |
| <br>BAB III                                                                                                                         |       |
| SISTEM PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH<br>PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM<br>KEDUDUKAN SEBAGAI SATUAN KERJA<br>PERANGKAT DAERAH ..... | 52    |
| A. Pembentukan Inspektorat Daerah Provinsi<br>Kalimantan Timur .....                                                                | 52    |
| B. Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi<br>Kalimantan Timur .....                                                                 | 65    |
| C. Kompetensi Inspektorat Daerah Provinsi<br>Kalimantan Timur .....                                                                 | 69    |

|                                                                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D. Bentuk Koordinasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah ..... | 77  |
| E. Kompetensi Auditor .....                                                                                                                                      | 80  |
| F. Sistem Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur .....                                                                                          | 82  |
| <br>BAB IV                                                                                                                                                       |     |
| KONSEP IDEAL PENGUATAN KELEMBAGAAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN PADA TATARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ..... |     |
|                                                                                                                                                                  | 120 |
| A. Struktur Kelembagaan Inspektorat Daerah .....                                                                                                                 | 120 |
| B. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah .....                                         | 126 |
| C. Kendala Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah .....                                       | 135 |
| D. Model Penguatan Kelembagaan Inspektorat Daerah Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Pada Tataran Satuan Kerja Perangkat Daerah ...                                 | 143 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                             | 164 |
| GLOSARIUM .....                                                                                                                                                  | 173 |
| BIODATA PENULIS .....                                                                                                                                            | 174 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.1 Alur Pengawasan Inspektorat Daerah<br>Provinsi Kaltim.....                                                              | 69  |
| Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah<br>Provinsi Kaltim .....                                                              | 74  |
| Tabel 2.3 Segmen Seluruh Inspektur Pembantu<br>Pengawasan (Irbanwas) pada I Inspektorat Daerah<br>Provinsi Kalimantan Timur ..... | 86  |
| Tabel 2.4 Segmen Irbanwas Bidang Khusus<br>Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur .....                                     | 89  |
| Tabel 2.5 Segmen Seluruh Irbanwas Bidang<br>Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah<br>Provinsi Kalimantan Timur.....        | 91  |
| Tabel 2.6 Segmen Seluruh Irbanwas Bidang<br>Perekonomian Inspektorat Daerah Provinsi<br>Kalimantan Timur .....                    | 95  |
| Tabel 2.7 Segmen Seluruh Irbanwas Bidang<br>Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Daerah Provinsi<br>Kalimantan Timur.....             | 96  |
| Tabel 2.8 Faktor pendukung dan kendala<br>pengawasan Inspektorat Daerah.....                                                      | 113 |
| Tabel 3.1 Pelaksanaan Jenis Kegiatan Pengawasan<br>Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur .....                             | 129 |

## DAFTAR BAGAN

|           |                                                                                                                        |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bagan 1.1 | Grafik Operasi Tangkap Tangan KPK<br>Tahun 2018-2022 .....                                                             | 8   |
| Bagan 1.2 | Kelembagaan dalam Konteks<br>Perencanaan.....                                                                          | 25  |
| Bagan 2.1 | Alur Koordinasi Laporan Keuangan<br>Pemerintah Daerah.....                                                             | 77  |
| Bagan 2.2 | Alur Pemeriksaan Inspektorat Daerah<br>Provinsi Kalimantan Timur.....                                                  | 84  |
| Bagan 3.1 | Susunan Organisasi Inspektorat<br>Daerah Provinsi Kalimantan Timur .....                                               | 123 |
| Bagan 3.2 | Isu Strategi Pelaksanaan Pengawasan<br>Sumber Daya Aparatur Pengawasan Hasil Laporan<br>Pemeriksaan Independensi ..... | 142 |

## **BAB I**

# **KONSEP PENGAWASAN INSPEKTORAT**

### **A. Ratio Legis Pengawasan Inspektorat**

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan sebuah lembaga dengan tugas mengawasi penyelenggaraan pemerintah, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dalam istilahnya lembaga pengawas internal. Dibentuknya 2 (dua) lembaga ini sesuai kewenangannya bertujuan menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. APIP diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).<sup>1</sup> SPIP adalah Sistem

---

<sup>1</sup> PP ini melaksanakan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Unsur SPIP terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Hal ini dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Untuk Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif,

Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi

---

dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko, dan analisis risiko. Kegiatan pengendalian ini memiliki karakteristik sebagai berikut: kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis, prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis, dan kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. informasi dan komunikasi berupa pengendalian umum, dan pengendalian aplikasi. Terakhir Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviden lainnya.

# SISTEM PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH

## Perspektif Hukum

Inspektorat daerah memegang peranan penting dalam proses terwujudnya akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan keuangan daerah untuk meminimalisir terjadinya korupsi dan kecurangan, serta-serta mengawasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan kebijakan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

Tujuan penguatan kelembagaan inspektorat daerah dapat sebagai komitmen untuk mengawal dan memberikan perhatian khusus atas tugas pengawasan yang dilaksanakan dapat lebih independen. Selain itu, didukung dengan pengembangan prosedur kerja dan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia inspektorat daerah, dan penguatan regulasi dalam spesifikasi pembagian peran/tugas inspektorat daerah yang jelas agar Inspektorat dapat lebih memiliki wibawa dan independen di masa yang akan datang.

Buku Sistem Pengawasan Inspektorat Daerah Perspektif Hukum ini memberi wawasan terhadap dunia pengawasan intern di dalam pemerintahan daerah, khususnya Kalimantan Timur untuk memahami aktivitas kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keuangan negara dari penyalagunaan wewenang, dan Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Sistem pengawasan inspektorat daerah penting bagi pemula yang ingin memahami dunia sistem pengawasan inspektorat daerah, baik bagi mahasiswa, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pegawai pemerintah serta masyarakat secara umum.